



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Aspek hukum dalam perjanjian kredit usaha hutan rakyat antara Departemen Kehutanan dengan kelompok tani hutan

WURYANTO, Imam, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA HUTAN RAKYAT ANTARA DEPARTEMEN KEHUTANAN DENGAN KELOMPOK TANI HUTAN

Imam Wuryanto¹ Nindyo Pramono² Mustafa³

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada KU HR dalam hal perjanjiannya dan upaya hukum yang ditempuh dalam hal terjadi kemacetan dalam pengembalian kredit oleh pihak Departemen Kehutanan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang terdiri dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Alat penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data data primer adalah wawancara, pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam pelaksanaannya banyak disebabkan oleh faktor wanprestasi, wanprestasi karena :
 - a. Tidak ditepatinya isi perjanjian antara Departemen Kehutanan dan Bank Pembangunan Daerah, dalam hal pengaturan administrasi
 - b. Tidak ditepatinya isi perjanjian antara Bank Penyalur dengan Petani peserta KUHR dalam hal penyaluran kredit
 - c. Tidak ditepatinya isi perjanjian antara Petani peserta KUHR dengan Mitra Usaha, dalam hal kerjasama penyelenggaraan KUHR
2. Upaya yang pernah diambil Departemen Kehutanan dalam menyelesaikan kredit macet melalui pendekatan teknis namun tidak berhasil, sampai saat ini penyelesaian melalui pendekatan hukum sulit dilakukan karena keberadaan mitra usaha dan kelompok tani tidak jelas, sehingga upaya penyelesaian adalah melalui musyawarah.

Kata kunci : Perjanjian-Wanprestasi-Musyawarah

¹ Departemen Kehutanan

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

³ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta